

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUHAMAD PAHLEVY WISNU WARDANA

C100150247

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP
BARANG JAMINAN ATAS PERKARA WAN PRESTASI DEBITUR
TIDAK MAMPU MEMBAYAR ATAS HUTANG PIUTANG BANK**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

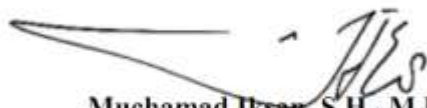
MUHAMAD PAHLEVY WISNU WARDANA

C100150247

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing


Muchamad Iksan, S.H., M.H.

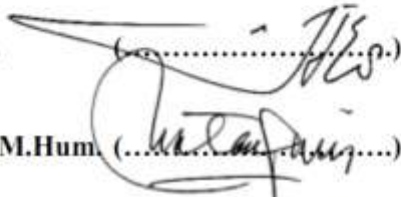
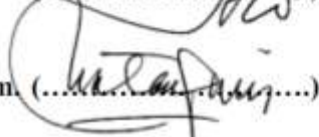

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP
BARANG JAMINAN ATAS PERKARA DEBITUR TIDAK MAMPU
MEMBAYAR HUTANG PIUTANG**

OLEH
MUHAMAD PAHLEVY WISNU WARDANA
C100150247

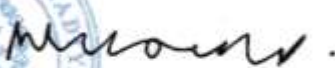
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Kamis, 2 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H., M.H. (Ketua Dewan Penguji) 
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (Anggota I Dewan Penguji) 
3. Sudaryono, S.H., M.Hum. (Anggota II Dewan Penguji) 

Dekan




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

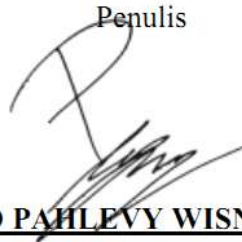
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 Juli 2020

Penulis



MUHAMAD PAHLEVY WISNU WARDANA

C100150247

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN.Skt)**

Abstrak

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut: a) untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik; b) untuk mengetahui pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt; c) untuk mengetahui pornografi dalam perspektif Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif*. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum positif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan melalui Pasal 282 Ayat (1), Pasal 282 Ayat (2) dan Pasal 282 Ayat (3) terkait dengan pornografi secara tulisan atau lisan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan; yang diikuti dengan Pasal 533 terkait dengan gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan napsu birahi para pemuda. Kemudian, Pornografi dijelaskan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum. Bahwa dalam hukum pidana, unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”: a) Bertentangan dengan hukum objektif; atau; b) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; d) Tanpa kewenangan. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt tentang Pornografi jika dalam fiqh jinayah terkategori hukum pidana ta’zir. Ulama memandang bahwa jinayah yang berkaitan dengan ta’zir hukumannya tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan memberikan sanksi (ta’zir) dengan membuat undang-undang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra’ Ayat 32 kita dilarang mendekati zina, An-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat Al-Ahzab Ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-Maidah Ayat 2 tentang kewajiban saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.

Katakunci: tindak pidana pornografi, factor penyebab tindak pidana pornografi, penyelesaian tindak pidana pornografi

Abstract

The purpose of this research is as follows: a) to find out the legal arrangements for criminal acts of pornography through electronic media; b) to find out the evidence of the judge in determining the defendant guilty of spreading pornographic content in Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt; c) to find out pornography in the perspective of Islamic law. The method used in this research is the normative approach and the type of research used is descriptive. The results obtained are the regulation of pornography in positive law governed by several laws and regulations, including: Criminal Code (KUHP) formulated through Article 282 Paragraph (1), Article 282 Paragraph (2) and Article 282 Paragraph (3) relating to pornography in writing or orally as a livelihood or habit; followed by Article 533 relating to images or objects, which are capable of arousing the lust of youth. Then. Pornography is explained in Law Number 44 Year 2008 Concerning Pornography Article 4 paragraph (1) jo Article 29. Panel of Judges in Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt assesses the deed committed by the defendant is intentional as a possibility because based on the testimony of witnesses connected with the defendant's legal facts obtained. Whereas in criminal law, the element without rights or against the law is also referred to as "wederrechtelijk": a) Contrary to objective law; or; b) Contrary to the rights of others; or; c) Without the rights that exist in a person; or; d) Without authority. The defendant is capable of being held responsible, then must be found guilty and in Decision Number 169 / Pid. Sus / 2018 / PN. Skt on Pornography if in *jihayic fiqh* is categorized as criminal law *ta'zir*. Ulama view that *jinayah* relating to *ta'zir* is not monolithic, can be sentenced to death, bound, imprisoned, exiled, or fined. Violations that do not have legal provisions, the state has the authority to impose sanctions (*ta'zir*) by making laws. Indonesian Ulema Council Fatwa Number 287 of 2001 on Pornography and Porno dated August 22, 2001, based on *al-Isra* 'verse 32, we are prohibited from approaching adultery, *An-Nur* verses 30-31 regulates how to get along, maintain honor, and limit the genitalia of *Al- Ahzab* Verse 59 regulates the genitalia of believing women, and *Al-Maidah* Verse 2 regarding the obligation to help each other in doing virtue and piety, and the prohibition of doing help to help in committing sins and violations, so the limits of pornography and porno-action according to Islamic law are clear.

Keywords: pornography, factors causing pornography, settlement of pornography

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan juga Undang-undang Tahun 1945 dimana menjunjung nilai yang tinggi terhadap moral, etika maupun akhlak serta berkepribadian luhur dalam berbangsa. Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dimana diartikan bahwa rakyat Indonesia memiliki nilai keimanan.

Penegakan hukum memiliki hubungan timbal balik yang terkait erat dengan keberadaan masyarakat. Hal ini berdampak pada penegakan hukum yang berlaku memiliki kecenderungan-kecenderungan sendiri berdasarkan struktur masyarakat yang berkembang. Struktur sosial merupakan kendala terhadap sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum berjalan dan dapat memberikan hambatan, sehingga penegakan hukum tidak dapat dijalankan dengan efisien serta efektif (Rahardjo, 2009).

Soerjono Sukanto menjelaskan bahwa masalah utama dan paling fundamental daripada penegakan hukum terdiri dari beberapa faktor, diantaranya: a) Faktor Hukum, yang dimaksud adalah Undang-undang yang berlaku; b) Faktor Penegak Hukum, diantaranya adalah para pihak yang membuat maupun yang menerapkan hukum; c) Faktor Masyarakat, masyarakat memiliki posisi yang penting dalam penegakan hukum. Semakin baik kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka akan memberikan dampak pada penegakan hukum yang baik. Sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka sulit untuk penegakan hukum yang baik; d) Faktor Kebudayaan, hal ini merupakan hasil karya, cipta dan rasa berdasarkan pada karsa manusia pada pergaulan hidup (Sukanto, 1983).

Pembangunan hukum nasional dijalankan dengan tujuan memberikan pencegahan terhadap berkembangnya aspek kehidupan masyarakat berdasarkan globalisasi pada bidang ekonomi dan perdagangan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini harusnya menjelaskan bahwa hukum didahulukan daripada dinamika masyarakat yang tidak dapat memainkan perannya pada rekayasa sosial terhadap perkembangan wawasan dan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia (Suratman dan Laksana, 2014).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatkan perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Pembangunan

hukum nasional meliputi etika pembangunan hukum nasional, kebijakan pembangunan hukum nasional dan Kebijakan pembangunan hukum nasional.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata kita untuk melakukan penggalian informasi tanpa batas. Dalam kemajuan teknologi tersebut mempermudah akses menuju era digitalisasi. Namun pemanfaatan kemudahan informasi juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan pornografi melalui internet (Suratman dan Laksana, 2014).

Pornografi atau porno aksi merupakan perbuatan yang memberikan dampak negatif pada perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban atau pelaku. Pornografi dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Di tengah-tengah persoalan mengenai pemberantasan tindak pidana pornografi muncul polemik dalam masyarakat ketika pembentuk undang-undang menetapkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam kasus pornografi sebagaimana dijelaskan pada Putusan Nomor. 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt, dimana Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira-kiranya pada pukul 18.00 WIB yang bertempat di Hotel Megaland, Purwosari, Laweyan, Surakarta. Dengan sengaja membuka dan atau melakukan penelusuran situs porno melalui aplikasi penjelajah website (*aplikasi browser*) yang terpasang di handphone merek Sony Xperia Z1 Compact warna hitam milik Terdakwa yang terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi (*wireless fidelity*) LED (*light emitting diode*) Running Text untuk keperluan periklanan (*advertising*) Hotel

Megaland Surakarta, Terdakwa mengetahui jika handphonenya akan secara otomatis akan terkoneksi dengan Wi-Fi LED Running Text Hotel Megaland Surakarta. Selanjutnya Terdakwa melakukan pencarian dengan mesin pencarian website Google dengan kata kunci “SERVIS MEMEK” lalu dihalaman Google terdapat tulisan “TERIMA SERVIS JEMBUT MEMEK”, pencarian yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian tersalin (*tercopy*) dimesin LED Running Text Hotel Megaland Surakarta. Bahwa akibat dari tulisan “TERIMA SERVIS JEMBUT MEMEK” muncul di LED Running Text Hotel Megaland, sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas dan menjadi viral di media sosial.

Perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: a) Pasal 27 Ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; b) Pasal 45 Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdakwa pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt disebutkan tidak tahu bahwa situs porno yang diakses terhubung dengan Jaringan Wi-Fi dan LED Running Text Hotel Megaland. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kelalaian dalam pertanggungjawaban pidana. Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan

akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana (Moeljatno, 2006).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai penyebaran konten pornografi, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap proses penyebaran konten pornografi dengan teknologi atau media digital. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt).

Berdasarkan sebagaimana diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui medi elektronik?; b) Bagaimana pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt?; c) Bagaimana pornografi dalam perspektif Hukum Islam?

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt) dan norma hukum Islam yang terkait dengan pornografi (Muhammad, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai Analisis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media elektronik (Studi Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt) dan norma hukum Islam yang terkait dengan pornografi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum positif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:

3.1.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan hukum tentang pornografi dalam KUHP, yang dirumuskan melalui Pasal 282 Ayat (1) terkait dengan;

“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal 282 ayat (2) terkait dengan;

Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 282 ayat (3) terkait dengan pornografi secara tulisan atau lisan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan; yang diikuti dengan Pasal 533 terkait dengan gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nabsu birahi para pemuda. Kemudian.

3.1.2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pengertian pronografi dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu;

“gambaran sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan dimuka umum yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Jasa pornografi dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu;

“segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang-perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakkan lainnya”.

Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu: a) mengimpor; b) memperdengarkan; c) mempertontonkan; atau; d) menyalahgunakan kuasa.

Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) yaitu: a) yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan; dan; b) yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

3.1.3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (1) terkait dengan;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) terkait dengan ketentuan pidana yaitu;

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

3.2 Pembuktian hakim dalam menentukan terdakwa bersalah telah menyebarkan konten pornografi pada Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt

Pembuktian Hakim Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt berdasarkan KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan tetap didasarkan pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yang memberikan pengaturan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan sudah menunjukkan tahapan berbeda jika dibandingkan dengan penyelidikan. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Berbeda halnya dengan penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana. Penegak hukum yang bertugas dalam tahap penyidikan ini terdiri dari pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Terkait dengan penyidik dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik ini Pasal 43 angka 1 UU ITE memberikan penegasan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dimaksudkan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diberi wewenang melakukan penyidikan. PPNS Pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang berwenang melakukan penyidikan dalam hal perbuatan pidana informasi dan transaksi elektronik berada pada kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas penyidikan dalam perkara pidana informasi dan transaksi elektronik didasarkan atas perlindungan

terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran pelayanan publik dan integritas data atau keutuhan data (Pasal 43 angka 2 UU ITE).

Tahap penuntutan terhadap perkara pidana pornografi melalui internet menurut UU ITE merupakan wewenang khusus dari jaksa penuntut umum. Ketentuan hukum pasal 43 angka 7 UU ITE menegaskan bahwa apapun hasil penyidikan selanjutnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Terkait dengan perbuatan pidana pornografi melalui internet, pada umumnya jaksa penuntut umum menggunakan ketentuan hukum pasal 27 ayat (1) UU ITE. Penggunaan ketentuan hukum tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sarana internet yang digunakan untuk menampilkan atau menyebarkan informasi elektronik yang berkonten pornografi. Dengan kata lain, perbuatan pornografi melalui internet dipandang sebagai penggunaan internet yang menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Penuntut Umum pun dapat membuat Surat Dakwaan dengan berbagai macam bentuk tergantung pada posisi kasus yang ada. Untuk perbuatan yang jelas melakukan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat digunakan bentuk dakwaan tunggal, sebagaimana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Perkara.

Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan, merupakan bagian dari pelaksanaan hukum pembuktian yang berlaku dalam KUHAP. UU ITE sendiri tidak memberikan pengaturan secara khusus tentang pemeriksaan perkara pidana informasi dan transaksi elektronik oleh karenanya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pasal 41 UU ITE berlakulah model pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Tujuan dari pemeriksaan di sidang pengadilan tidak lain untuk mengumpulkan fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang sah di depan persidangan.

Atas permohonan terdakwa, serta pledoinya yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa apabila hakim berpendapat lain, memohon agar terdakwa diberikan keringan hukuman. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai teori pembedaan tujuan pembedaan bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik serta memperbaiki tingkah laku sipembuat, agar

dikemudian hari tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, tanpa harus menghilangkan keseimbangan sipembuat dan masyarakat.

Bertitik tolak dari teori pembedaan tersebut dengan memperhatikan pula permohonan terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa diberikan keringan hukuman. Maka dengan tidak pula mengesampingkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, menurut keyakinan Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa diharapkan telah dapat memberikan kemanfaatan dan telah pula dapat memenuhi rasa keadilan yang dapat diterima bagi diri Terdakwa maupun masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat dirasa cukup adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu: a) Hal-hal yang memberatkan: b) Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya; c) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya; d) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian MEGA LAND HOTEL SOLO; e) Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat; f) Hal-hal yang meringankan: g) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; h) Terdakwa belum pernah di hukum; i) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu Istri dan Anaknya.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan

telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) sangat terkait dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) seseorang, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “*Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights)*”.

3.3 Pornografi dalam perspektif Hukum Islam

Pornografi dan pornoaksi dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan asusila, dan dijelaskan dalam sebuah ayat “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” QS. Al Isra Ayat 32. Batasan dalam berpakaian dalam Islam dimana, laki-laki dan perempuan memiliki aurat atau bagian tubuh yang harus ditutupi menunjukkan standar yang harus dijaga, namun demikian batasan untuk pornoaksi bersifat subyektif, karena tergantung pada masing-masing individu.

Hukum Pidana Islam yang sering disebut dengan *fiqih jinayah*, juga mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar syara’, sanksi pidana itu dalam *fiqih jinayah* disebut dengan *uqubah* artinya hukuman. Jenis sanksi pidana dalam *fiqih jinayah* adalah *had*, *qishash* dan *ta’zir*, pengertian dari masing-masing hukuman itu secara berturut-turut adalah, *had*, adalah hukuman (*uqubah*) yang sudah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara’, namun manusia juga memiliki hak untuk menentukan, seperti dalam peristiwa pembunuhan maka pelaku bisa tidak dijatuhi hukuman *qishash* jika ada perma’afan dari keluarga korban, tetapi pelaku akan dikenai hukum *diyat*. Hukuman *ta’zir* yaitu hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’. Hukuman ini merupakan hak manusia (dalam arti hak penguasa/pemerintah/negara) (Muslich, 2016).

Standar di dalam *fiqh jinayah* yang digunakan adalah mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan khusus. Penolakan terhadap UU

Pornografi jika dianalisis lebih cenderung kepada kepentingan pelaku bisnis. Kepentingan yang mengarah pada publik relatif kecil. Hal ini terbukti, beberapa tayangan di berbagai media lebih menonjolkan aspek profit daripada dampak negatif di masyarakat. Dengan demikian, antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi bertolak belakang. Jika terjadi demikian, hukum Islam lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan khusus. Dalam kaidah fiqh disebutkan: Kemaslahatan (kepentingan) umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus.

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt tentang Pornografi jika dalam fiqh jinayah terkategori hukum pidana ta'zir. Ulama memandang bahwa jinayah yang berkaitan dengan ta'zir hukumannya tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan memberikan sanksi (ta'zir) dengan membuat undang-undang. Dalam hal ini, potensi ijtihad sangat dibutuhkan untuk menetapkan hukuman tersebut (Sahid, 2011).

Pada masa Nabi dan Abu Bakr, hukum pidana ta'zir dalam bentuk penahanan pernah dilakukan dengan tidak menyediakan tempat secara khusus. Jumlah umat Islam yang semakin bertambah dan kekuasaan umat Islam yang semakin luas, Khalifah 'Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya membeli rumah S}afwa>n bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham yang kemudian dijadikan penjara (Muhammad, 1953). Secara normatif, firman Allah surat al-Ma'idah ayat 33: (atau diasingkan dari muka bumi) mengarah pada hukuman penjara. Dalam hal ini, uli al-amr (pemerintah, negara) dapat membuat penjara berdasarkan langkah yang ditempuh oleh 'Umar dan berdasarkan surat al-Nisa' ayat 15.

Selain itu, Rasulullah pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, demikian juga tindakan 'Uthman yang pernah memenjarakan Dabi' bin Harith, salah satu pencuri dari Bani Tamim sehingga ia mati di penjara. Khalifah 'Ali juga pernah memenjarakan 'Abd Allah bin Zubayr di Mekah karena tidak mau membaiaat 'Ali (Amir, 1969).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra' ayat 32 kita dilarang mendekati zina, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pronografi/pornoaksi siber Pengaturan tindak pidana pornografi dalam hukum positif diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan melalui Pasal 282 Ayat (1), Pasal 282 Ayat (2) dan Pasal 282 Ayat (3) terkait dengan pornografi secara tulisan atau lisan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan; yang diikuti dengan Pasal 533 terkait dengan gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nabsu birahi para pemuda. Kemudian. Pornografi dijelaskan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan objeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi, yaitu: a) mengimpor; b) memperdengarkan; c) mempertontonkan; atau; d) menyalahgunakan kuasa. Dari perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menjualbelikan.

Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum. Bahwa dalam hukum pidana, unsur tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”: a) Bertentangan dengan hukum objektif; atau; b) Bertentangan dengan hak orang lain; atau; c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau; d) Tanpa kewenangan. Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu: a) Hal-hal yang memberatkan: b) Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya; c) Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya; d) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian Mega Land Hotel Solo; e) Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat; f) Hal-hal yang meringankan: g) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; h) Terdakwa belum pernah di hukum; i) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu Istri dan Anaknya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus panyebaran saat ini.

Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt tentang Pornografi jika dalam fiqh jinayah terkategori hukum pidana ta‘zir. Ulama memandang bahwa jinayah yang berkaitan dengan ta‘zir hukumannya tidak monolitik, bisa hukuman mati, dijilid, dipenjara, diasingkan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukum, negara punya kewenangan memberikan sanksi (ta‘zir) dengan membuat undang-undang. Dalam hal ini, potensi ijtihad sangat dibutuhkan untuk menetapkan hukuman tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat al-Isra’ Ayat 32 kita dilarang mendekati zina, An-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas aurat Al-Ahzab Ayat 59 mengatur tentang aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-

Maidah Ayat 2 tentang kewajiban saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornografi maupun pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.

4.2 Saran

Untuk pihak Kepolisian khusus terhadap penyidik, diharapkan kedepannya lebih mengedepankan upaya restorative dikarenakan terdakwa tidak sengaja atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan perbuatan terdakwa tidak berangkat dari unsur kesengajaan. Untuk legislatif, diharapkan mengenai tindak pidana pornografi ini memberikan peluang melakukan upaya restorative jika tidak memberikan efek sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Abd 'Aziz. (1969). *al-Ta'zir fi al-Shari'ah al-Islamiyah* t.t.p.: Dar al-Fikr al-'Arabiyah
- Bin Qayyim Al-Jawziyah, Shams Al-Din Muhammad bin Abi Bakr. (1953). *al-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Shar'iyah*, Kairo: Matba'at al-Sunnah al-Muhammadiyah
- Moeljatno. (2006). *KUHP*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2016). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika
- Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2018/PN. Skt
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakkan Hukum*, Yogyakarta: Publishing
- Sahid, H. (2011). *Pornografi Dlam Kajian Fiqh Jinayah*, Surabaya: SA Press
- Sukanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Persada
- Suratman, dan Laksana, Andri Winjaya. (2014) Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digital. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 1 No 2*.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi